



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (401939) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan
Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Website : www.pa-mukomuko.go.id

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. DASAR HUKUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mukomuko

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

Visi Pengadilan Agama Mukomuko adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”**. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mukomuko melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara.
2. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Mukomuko.
3. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No. 01/SK/II/1991.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama.
6. Terwujudnya Aparat peradilan yang baik.
7. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Terwujudnya penyelenggara-raan administrasi umum kesekretariatan pada Pengadilan Agama Mukomuko sesuai manajemen perkantoran yang modern.
9. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UAKPA Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP SAKTI dan Modul Aset dan Persediaan SAKTI. Modul GLP SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset & Persediaan SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Mukomuko menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan UAKPA Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Mukomuko. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/Jembatan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jembatan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer.	4
Franchise.	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pelaksanaan
Program
Penanganan
Pandemi
COVID-19
dan
Pemulihan
Ekonomi
Nasional
(PC-PEN)
Tahun 2023

A.6. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023

Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka pelaksanaan program penanganan pandemic COVID-19 telah menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan suplemen untuk menjaga imun tubuh bagi Pegawai;
2. Selalu mematuhi protoko kesehatan;

Satker/Kode Satker	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	
	Belanja Barang/Jasa	Total Pagu	Belanja Barang /Jasa	Total Realisasi
Pengadilan Agama /401939	Rp.1.760.000 Rp. 8.500.000	Rp.12.100.000	Rp. 600.000 Rp.8.500.000	Rp.9.100.000

Seluruh anggaran telah direalisasikan seluruhnya dengan pembelian berupa:

1. Pembelian Suplemen;

Realisasi
Pendapatan
Rp.0,-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan Pengadilan Agama Mukomuko adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	0	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	-
Penerimaan Hibah	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	0.00

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2023 dan 2022

Uraian	Desember 2021	Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	0	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	46	(100.00)
Penerimaan Hibah	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	46	(100.00)

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp 0,-

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0.

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
12.141.387.720

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 12.141.387.720 atau 68 % dari anggaran belanja sebesar Rp 17.942.097.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,097,026,000	2,090,439,907	99.69
Belanja Barang	835,460,000	829,718,651	99.31
Belanja Modal	15,009,611,000	9,221,229,162	61.44
Jumlah	17,942,097,000	12,141,387,720	67.67

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Sampai dengan 31 Desember 2023 secara total per jenis belanja mengalami kenaikan sebesar 46.35 %. Kenaikan tersebut dikarenakan pada tahun 2023 sudah terdapat realisasi belanja modal pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan pada tahun lalu realisasi belanja modal pembangunan Gedung dimulai pada Semester II. Terdapat juga kenaikan pada belanja pegawai dikarenakan ada penambahan pegawai dan ada pegawai yang mengalami kenaikan jabatan, pangkat serta kenaikan gaji berkala.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	2,090,439,907	2,014,411,698	3.77
Belanja Barang	829,718,651	818,056,473	1.43
Belanja Modal	9,221,229,162	5,463,764,240	68.77
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	12,141,387,720	8,296,232,411	46.35

Belanja
Pegawai
Rp.
2.090.439.907

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.090.439.907 dan Rp.2.14.411.698 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada tahun 2023 semester I terdapat kenaikan dibanding tahun lalu dikarenakan ada penambahan pegawai pindah masuk, ada kenaikan pangkat, dan ada kenaikan jabatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	917,808,160	860,201,700	6.70
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,672	16,024	(20.92)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54,607,244	51,577,352	5.87
Belanja Tunj. Anak PNS	19,691,956	17,827,582	10.46
Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	21,280,000	18.42
Belanja Tunj. Fungsional PNS	766,940,000	755,080,000	1.57
Belanja Tunj. PPh PNS	75,359,250	74,426,700	1.25
Belanja Tunj. Beras PNS	56,342,760	52,649,340	7.02
Belanja Uang Makan PNS	157,343,000	162,908,000	(3.42)
Belanja Tunjangan Umum PNS	17,875,000	18,445,000	(3.09)
Jumlah Belanja Kotor	2,091,180,042	2,014,411,698	3.81
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(135)	-	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	(740,000)	-	-
Jumlah	2,090,439,907	2,014,411,698	3.77

Pada Tahun 2023 terdapat kenaikan belanja Pegawai sebesar 3.77 % dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pegawai yang kenaikan pangkat, jabatan, KGB, serta penambahan anggota keluarga.

Belanja Barang
Rp.
829.718.651

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 829.718.651 dan Rp. 818.056.473 Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.43 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,360,000	0	-
Belanja Barang Operasional	491,723,203	468,292,691	5.00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38,400,000	29,997,500	28.01
Belanja Jasa	48,057,850	96,774,954	(50.34)
Belanja Pemeliharaan	166,537,598	173,436,328	(3.98)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	77,640,000	49,555,000	56.67
Jumlah Belanja Kotor	829,718,651	818,056,473	1.43
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	829,718,651	818,056,473	1.43

Kenaikan realisasi belanja barang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya anggaran belanja barang ekstrakomptible;

Belanja Modal
Rp.
9.221.229.162

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.221.229.162 dan Rp. 5.463.764.240. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598,644,630	10,000,000	5886.45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,622,584,532	5,453,764,240	58.10
Jumlah Belanja Kotor	9,221,229,162	5,463,764,240	68.77
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	9,221,229,162	5,463,764,240	68.77

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan 68.77 %, dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penambahan belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian fasilitas perkantoran (Meubelair).

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LRA

Tidak ada

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening Bank	0	0
Kuitansi yang belum di-GU-kan	0	0
Pembulatan karena tidak tersedia pecahan uang kecil	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Jumlah	0	0

Uang Muka Belanja
(prepayment)
Rp0,-

C.3 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Uang Muka Belanja

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Uang Muka Belanja	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.
2.011.500

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.011.500 dan Rp. 4.728.500.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	2,011,500	4,728,500
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	2,011,500	4,728,500

Tanah
Rp.65.155.040

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Mukomuko per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 65.155.040 dan Rp.65.155.040. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2023	65,155,040
Mutasi tambah:	
Revaluasi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2023	65,155,040

Peralatan dan
Mesin
Rp. 2.014.076.197

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 2.14.076.197 dan Rp.1.351.997.167

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1,415,431,567
Mutasi tambah:	598,644,630
Mutasi kurang:	0
Saldo Akhir	2,014,076,197
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-1,096,661,552
Nilai Buku per 30 Juni 2023	917,414,645

Gedung dan
Bangunan
Rp.0

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi Aset	0
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

Jalan, Irigasi dan
Jembatan Rp.0

C.8 Jalan, Irigasi dan Jembatan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembangunan Irigasi	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	0
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(1.096.661.552)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.(1.096.348.772) dan Rp.(802.972.486). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,014,076,197	1,096,661,552	917,414,645
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
	Jumlah	2,014,076,197	1,096,661,552	917,414,645

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp, 14.076.348.772

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang nilainya akan menjadi saldo Gedung dan bangunan Ketika selesai dikerjakan. Nilai Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 14.076.348.772

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,076,348,772	5,453,764,240
Jumlah	14,076,348,772	5,453,764,240

Aset Lainnya
Rp.357.209

C.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 357.209 dan Rp. 357.209. Mutasi transaksi terhadap Aset

Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	357,209
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Des 2023	357,209
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	0
Nilai Buku per 31 Des 2023	357,209

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 761.000

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 761.000 dan Rp. 4.166.947. Utang pihak ketiga pada 31 Desember tahun 2023 adalah beban belanja yang masih harus dibayarkan pada tahun 2024

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	761,000	4,166,947
Jumlah	148,629,899	4,166,947

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.0,-

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar karena telah diterima tagihannya, yaitu dan belanja barang yang sudah di input kwitansi tapi belum di GUP kan.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
Jumlah	0	0

Uang Muka dari
KPPN
Rp.0

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp. 15.060.526.166

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.060.526.166 dan Rp.6.068.862.723. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Ekuitas	15,060,526,166	6,068,862,723
Jumlah	15,060,526,166	6,068,862,723

Catatan Penting Lainnya untuk Pos Neraca

Tidak ada

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan PNBP Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan PNBP tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan PNBP Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Pada Satker 401939 tidak terdapat PNBP.

Beban Pegawai Rp.
2.090.476.907

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.2.090.476.907 dan Rp. 2.008.645.895. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	917,808,160	856,954,500	7.10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,537	15,543	(19.34)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54,607,244	51,271,322	6.51
Belanja Tunj. Anak PNS	19,691,956	17,705,170	11.22
Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	21,280,000	18.42
Belanja Tunj. Fungsional PNS	766,940,000	753,280,000	1.81
Belanja Tunj. PPh PNS	75,359,250	74,426,700	1.25
Belanja Tunj. Beras PNS	56,342,760	52,359,660	7.61
Belanja Uang Makan PNS	157,380,000	162,908,000	(3.39)
Belanja Tunjangan Umum PNS	17,135,000	18,445,000	(7.10)
Jumlah	2,090,476,907	2,008,645,895	4.07

Beban Persediaan
Rp. 39.547.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.547.000 dan Rp. 32.388.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	39.547.000	32.388.500	22.00
Jumlah	0	0	-

Beban Barang dan
Jasa
Rp. 586.721.706

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 586.721.706 dan Rp. 565.449.165. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perbandingan Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	428,429,106	378,601,260	13.16
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,396,600	2,400,000	(0.14)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,644,000	34,200,000	51.01
Beban Barang Operasional Lainnya	9,250,000	49,563,608	(81.34)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,360,000	-	-
Beban Jasa Lainnya	900,000	-	-
Beban Langganan Listrik		39,867,802	(100.00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		3,498,095	(100.00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		13,600,000	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	43,023,600		
Beban Sewa	43,718,400	43,718,400	0.00
Jumlah	586,721,706	565,449,165	3.76

Beban barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3.76 persen dari beban barang dan jasa di tahun 2022. Hal tersebut karena adanya penambahan anggaran belanja barang ekstrakomptabel.

Beban Pemeliharaan
Rp. 168.107.598

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 168.107.598 dan Rp. 173.436.328. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,999,250	79,999,269	(37.50)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,570,000		-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116,538,348	93,437,059	24.72
Jumlah	168,107,598	173,436,328	(3.07)

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 77.640.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.640.000 dan Rp. 49.555.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	77,640,000	49,555,000	56.67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Jumlah	77,640,000	49,555,000	56.67

Terdapat kenaikan pada tahun 2023 sebesar 56.67%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp. 280.381.816

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 280.381.816 dan Rp. 241.670.281 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	280,381,816	241,670,281	16.02
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	0	-
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	280,381,816	241,670,281	16.02

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	46
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	(46)

Ada surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.46 pada tahun 2022 yang berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus/(Defisit) LO
Rp-3.242.875.027

D.10 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-3.242.875.027 dan Rp.-3.071.145.123.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LO

Tidak Ada

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
6.086.862.723

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.086.862.723 dan Rp.545.849.481.

Surplus/(Defisit) LO
Rp-3.242.875.027

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp-3.242.875.027 dan Rp.-3.071.145.123. Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.0

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.12.234.538.470

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.234.538.470 dan Rp.3.071.145.123 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Sampai dengan 30 Desember 2022

Uraian	2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,141,387,720
Diterima dari Entitas Lain	
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	93,150,750
Jumlah	12,234,538,470

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar digunakan untuk mencatat saldo-saldo transfer antar entitas yang diakibatkan penerimaan aset. Untuk periode yang berakhir

tanggal 31 Desember 2023, nilai transfer masuk sebesar Rp.93.150.750 dan Transfer Keluar sebesar Rp0. Transfer masuk merupakan penerimaan Alat Pengolah Data dari Mahkamah Agung RI.

Rincian Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	2023
Alat pengolah data perlengkapan sidang online	93,150,750
Laptop	
Scanner	
Jumlah	93,150,750

Pada transfer masuk tahun 2023 terdapat transfer masuk alat pengolah data berupa Laptop dan printer.

*Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas
Rp.8.991.663.443*

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.8.991.663.443 dan Rp. 5.523.013.242.

*Ekuitas Akhir
Rp.15.060.526*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.15.060.526 dan Rp.6.068.862.723.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LPE

Tidak Ada

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Pengungkapan Lain-
lain*

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satker

Saldo rekening satker pada 31 Desember 2023 adalah Rp.0 untuk seluruh rekening yang dimiliki. Adapun rincian informasi rekening satker tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 des 2023
1	65324401939100	BPG 181 PENGADILAN AGAMA 401939	0

Saldo akhir per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 untuk rekening pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko.

2. Uang Tunai di Brankas

Uang Tunai di brankas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

3. Revisi DIPA

-Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasional kegiatan (POK). Hal tersebut dirasa perlu dilakukan untuk meminimalisir deviasi halaman III DIPA serta untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja pada Pengadilan Agama Mukomuko

Kejadian-kejadian
Setelah Tanggal
Neraca

5. Jurnal Manual dan Reklas

-Pada Tahun 2023 tidak ada.

F.2 Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Neraca

-Telah dilakukan revisi administrasi berupa revisi halaman III DIPA dan pemutakhiran petunjuk operasional kegiatan pada tahun 2023.

- terdapat ketidak sesuaian akun belanja dan kode barang aset, karena terdapat belanja modal dengan harga satuan barang di bawah kapitalisasi (dibawah Rp. 1.000.000), hal tersebut sudah di buat surat pernyataan oleh KPA.

- seluruh KDP Pembangunan Gedung Kantor tidak di proses menjadi Aset Tetap, karena Pembangunan belum selesai disebabkan putus kontrak, dengan demikian bangunan tersebut belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.